

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA BERBASIS PENELITIAN

Daud Bahransyaf

## ABSTRAK

*Wilayah NKRI yang gemah ripah loh jinawi, subur dan memiliki kekayaan alam dan laut yang sangat berlimpah, ternyata juga merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana alam. Bencana alam ini baik yang diakibatkan oleh gempa vulkanik maupun tektonik, serta akibat ulah manusia.*

*Sudah banyak terjadi bencana alam dan korban jiwa yang berjatuhan, kerugian material yang sudah tak terhitung lagi jumlahnya dan bahkan beberapa tahun belakangan ini bencana tersebut terjadi hampir seluruh provinsi di wilayah NKRI ini.*

*Studi tentang pemberdayaan masyarakat pasca bencana ini mencoba mendeskripsikan berbagai kejadian bencana alam di Indonesia, yang terjadi selama periode tahun 2000 – 2006 dimana pada masa itu banyak terjadi peristiwa bencana alam yang memakan banyak korban jiwa. Melalui kajian dari berbagai sumber informasi maupun hasil penelitian, diharapkan dapat ditemukan model pemberdayaan pasca bencana yang dapat dijadikan acuan bagi para pengguna.*

*Upaya-upaya tersebut salah satunya adalah melakukan pemberdayaan atau penguatan kepada para korban yang telah kehilangan harta benda dan usaha/pekerjaan, melalui pranata sosial/lembaga sosial lokal yang peduli terhadap masalah ini. Membuka akses dan membantu pendampingan pada akses ekonomi lokal, agar mereka dapat eksis lagi menapaki kehidupan dan penghidupan sosial ekonomi di masa mendatang.*

**Kata kunci :** *Pemberdayaan Pasca Bencana*

## I. LATAR BELAKANG

Bencana alam yang terjadi di Indonesia secara berkesinambungan ini tidak lepas dari kondisi geologis dan geografis Indonesia. Adanya +/- 500 gunung berapi, dimana 128 diantaranya masih aktif (Dit.BS-KBA,2003), adanya lempengan patahan yang berada di barat sampai timur Jawa, Sumatera sampai dengan wilayah timur Indonesia yakni Papua, bahkan menurut beberapa pakar dibidang ini, selat sunda harus sudah harus diwaspadai karena beban yang cukup berat bertumpu disini. Pergeseran pulau Sumatera searah jarum jam sebesar +/- 4 mm per tahun dengan porosnya di Lampung, aktifnya anak Krakatau dan lempengan patahan berada di selat ini. Dikhawatirkan akan terjadi gempa bumi yang cukup besar dan kemungkinan disertai tsunami.

Memasuki awal tahun 2009, yakni 4 Januari 2009, terjadi gempa dengan kekuatan 7,2 SR (Skala Richter), tepatnya di Kabupaten Manokwari, Papua Barat bahkan getarannya dirasakan sampai di Sorong. Bahkan sebanyak

138 gempa susulan dengan 5,8 SR terus terjadi sampai beberapa hari. Akibat gempa ini banyak bangunan yang runtuh, korban jiwa dan sekitar 12.314 orang mengungsi ketempat yang dianggap aman. Setidaknya terdapat 17 titik tempat pengungsian (Trans TV,15.01.2009). Pada akhir Januari dan awal Februari 2009 terjadi bencana banjir (banjir bandang di beberapa wilayah) hampir diseluruh pulau.

Bencana alam merupakan suatu proses yang dinamis, dan tidak dapat dihindari dan diprediksi terjadinya. Selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi bencana alam. Terutama gempa dan tsunami seperti yang terjadi di NAD (Nangroe Aceh Darusallam), di wilayah Ciamis Jawa Barat yakni di wilayah Pangandaran, di provinsi Jawa Timur yakni Malang, bahkan yang cukup mengejutkan adalah bencana Situ Gintung di Jakarta beberapa waktu lalu.

Apabila ditelaah, bahwa dalam kurun waktu tahun 2006-2008 misalnya, cukup banyak terjadi bencana alam di wilayah NKRI, baik gempa vulkanik di DI Yogyakarta yang

memuntahkan lahar panas dan awan panas, banjir bandang seperti di provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Timur. Belum lagi kasus yang sudah cukup lama, tapi sampai saat ini belum tuntas penanganannya, yakni lumpur panas Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, akibat kecerobohan pengerjaan pengeboran minyak yang dilakukan Lapindo Brantas. Dan masih banyak lagi kasus-kasus bencana alam lainnya, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan sebagainya. Bahkan di penghujung tahun 2008, khususnya wilayah DKI Jakarta, wilayah Jakarta utara terjadi banjir Rob karena air laut pasang.

Selain adanya korban jiwa akibat bencana alam ini, juga kehilangan harta benda, terutama pada musibah gempa dan tsunami, bagi mereka yang selamat dari terjangan ini, ternyata mengalami trauma mendalam karena kehilangan anggota keluarganya, akibat ganasnya ombak laut yang menggulung mereka. Pada waktu terjadinya bencana, banyak yang peduli dan prihatin akan musibah ini. Bantuan dan kepedulian pemerintah serta masyarakat pada saat terjadinya bencana sangat berlimpah. Tampaknya ini berlangsung sampai beberapa saat saja, setelah itu satu persatu akan menghilang dan sibuk kembali dengan kegiatan rutinitas. Pada fase pasca bencana ini, para korban bencana justru perlu perlindungan dan bantuan untuk memulai hidup kembali seperti sedia kala.

Untuk itu perlu adanya upaya pemberdayaan pada pasca bencana, tiada lagi kepedulian dari pihak pemerintah dan masyarakat pada fase ini, sebab dianggap telah selesai melakukan upaya-upaya pertolongan (tanggap darurat) dan bantuan kepada para korban.

Bila dilihat dari amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Bab V Pasal 26 dan 27 terkait dengan "Hak dan Kewajiban Masyarakat" serta PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya pada Paragraf 5 Pasal 87 point (1) "Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan

rasa kepedulian daerah rawan bencana". Namun tampaknya upaya yang baik, dari Pemerintah maupun masyarakat, masih dianggap belum terlihat efektif.

## II. PERMASALAHAN

Dari beberapa kejadian bencana alam, menimbulkan beberapa permasalahan sosial di antaranya: hancur atau rusaknya rumah dan perabot rumah tangga; sarana dan prasarana sosial ekonomi juga banyak yang hancur/rusak; trauma, shock dan penyakit (diare, flu dsb); hilangnya mata pencaharian atau lapangan pekerjaan; sementara hidup di kamp pengungsian dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

Meskipun telah banyak upaya yang telah dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, namun tampaknya hal tersebut belum menuntaskan permasalahan yang dialami para korban. Pertanyaannya adalah upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan berbagai pihak dan sejauhmana efektivitas pelayanan yang diberikan selama ini.

## III. TUJUAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menginformasikan dan mengetahui terjadinya bencana alam dan korban jiwa yang terjadi tahun 2000-2006, serta perlunya upaya pemberdayaan kepada para korban pasca bencana.

## IV. STUDI LITERATUR

Beberapa tahun belakangan ini, di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia ini selalu mengalami bencana alam. Banjir, tanah longsor dan kebakaran (baik kebakaran rumah maupun hutan) sepertinya mendominasi terjadinya bencana alam. Belum lagi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi baik yang disertai tsunami maupun tidak, tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Bencana alam ini ada yang diakibatkan oleh manusia dan ada juga karena faktor alam, yang dalam hal ini dapat kita katakan karena kekuasaan sang pencipta alam semesta ini, yaitu iradat Allah SWT.

Karena ulah manusia yang dengan segala macam alasan, tanpa berfikir panjang, mereka membatasi hutan seenaknya, dan menjual hasil jarahnya kepada para penadah kayu atau cukong-cukong kayu demi rupiah. Akibat keserakahan manusia tersebut, menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Thalhah dan A.Mufid,2008), tutupan hutan di Pulau Jawa tinggal 7 %, Nusa Tenggara 25 %, Sumatera 25 %, Bali 27 %, Kalimantan 44 %, Sulawesi 64 %, Maluku 73 %, dan Papua 81 %. Maka tidak aneh jika, berdasarkan data wahana lingkungan hidup (Walhi), banjir dan tanah longsor mendominasi bencana tahun 2006-2007, khusus di Pulau Jawa. Bencana ini terjadi di lebih dari 2.850 desa pada 61 Kabupaten/Kota. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan periode 2000-2003, yakni pada 1.288 desa.

Sementara menurut data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam, sepanjang 2007 telah terjadi 379 bencana alam. Sebanyak 67 % diantaranya berupa banjir dan tanah longsor. Setidaknya 918 orang tewas dan tidak ditemukan dalam bencana tersebut serta 200.000 rumah penduduk rusak.

Pandangan lainnya (MT.Zen,2001), bencana alam merupakan salah satu fenomena alam seperti badai, kekeringan, banjir, bencana kebumihan seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lain-lain. Kejadian-kejadian itu merupakan bagian dari proses alam. Kita namakan "bencana" bila ia berlangsung didaerah yang dihuni manusia dan ada manusia yang terancam jiwanya. Jika tanah longsor terjadi ditengah hutan rimba Kalimantan dimana tidak ada manusia sama sekali, tidak akan ada yang peduli, betapapun besar longsorannya itu. Kehidupan manusia ditempat lain terus berlangsung dan media tidak akan mempedulikannya. Sebaliknya jika ada tanah longsor kecil yang terjadi di daerah pemukiman manusia dan ada korban jiwa atau kerugian material, maka kejadian itu dijuluki "bencana alam". Kegiatan manusia dan kegiatan industri pun dapat mengakibatkan bencana, seperti bobolnya waduk serba guna, meledaknya sebuah pabrik petro kimia (Bhopal), terjungkirnya truk yang mengangkut bahan kimia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kebakaran dan terganggunya arus lalu

lintas. Hal seperti itu dapat menarik media dan dalam sekejap sudah ditayangkan di layar televisi keseluruh dunia.

Bencana alam dan bencana industri atau bencana buatan manusia yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian material perlu ditangani. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan untuk mencegah kerugian yang besar. Masalah itu memerlukan penanganan atau penanggulangan oleh suatu badan, lagi pula bencana alam bersifat lintas sektoral. Di Indonesia, pada umumnya orang sibuk, ribut, panik bila bencana alam itu sudah terjadi. Ini salah besar.

Peneliti dari Pusat Mitigasi Bencana (PMB), Institut Teknologi Bandung (Imam A.Sadikun,2007), mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia belum siap menghadapi kerentanan berbagai macam bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut dan gunung meletus. Dalam skala nilai kesiapan terendah 0 dan tertinggi 5, rata-rata Pemerintah Daerah Cuma dapat angka 3 atau kurang. Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap daerah di Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, letusan gunung berapi, wabah penyakit, tanah longsor, angin ribut dan banjir. Namun faktanya di lapangan kapasitas daerah secara umum masih rendah, sebagian besar dari instansi pemerintah belum memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam program kerjanya. Ketidaksiapan juga terlihat dari Peraturan Daerah (Perda) yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dan belum dikendalikan secara ketat pelaksanaannya dilapangan.

Belum ada program khusus penanggulangan bencana, lebih banyak yang sifatnya insidental (tindak darurat) dan belum dimasukkan kedalam program reguler pemerintah. Ada kejanggalan pola kebijakan di beberapa kabupaten yang tidak menunjukkan sinkronisasi antara kebutuhan dan program kerja. Ada kabupaten yang punya peta gempa untuk daerahnya, padahal kejadian gempa sangat jarang terjadi disana. Daerah itu justru rawan tanah longsor, tapi mereka tidak punya peta tanah longsor.

Bila terjadi bencana alam, sudah dipastikan banyak pengungsi yang mencari lokasi yang dianggap aman. Para korban ini bisa sehari-hari hidup ditempat pengungsian dengan segala kekurangan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kehidupan ia dan keluarganya. Menurunnya kualitas kebersihan, akan menimbulkan pelbagai penyakit kulit (P.Canahar,2005). Layaknya daerah bencana, kekurangan makanan akan memicu gangguan kesehatan terkait gizi, terutama pada bayi, balita dan orang lanjut usia. Selain itu banyaknya orang berkumpul ditempat penampungan, kondisi lelah, stres ditambah cuaca dingin, berangin dan hujan akan memudahkan terjadinya wabah infeksi saluran pernafasan. Mulai dari pilek, bronkhitis, sampai pnemonia (radang paru). Kasus tuber kolosis juga bisa bertambah dalam jumlah dan keparahan.

Menurut surat kabar Solopos (Desember 2008) Indonesia terancam diguncang bencana alam berskala besar yang bisa merenggut sekitar satu juta orang. The Sydney Morning Herald (26 Desember 2008), mengutip sebuah laporan ilmiah menyebutkan. Indonesia masuk dalam daerah Asia Pasifik yang terancam bencana alam besar selain Filipina dan China. Menurut Sydney Morning Herald, sebagaimana dikutip dari tempo interaktif.com, laporan tersebut merupakan hasil penelitian Geosciene Australia. menjelaskan dalam beberapa tahun mendatang dampak bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami semakin parah karena populasi yang terus meningkat dan perubahan iklim. Harian ini juga menyebutkan, laporan tersebut membuat Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pusat penelitian dan pelatihan penanggulangan bencana. Menurut penelitian itu, daerah disebelah Himalaya seperti Indonesia, china dan Filipina diperkirakan dilanda gempa bumi yang korbannya bisa mencapai satu juta orang. Indonesia dan Filipina juga terancam diguncang letusan gunung berapi yang bisa menelan korban ratusan ribu orang.

Tentunya dari beberapa resensi buku diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan terjadinya bencana alam. Belum atau masih rendahnya Pemda dalam menangani korban bencana dan termasuk mengantisipasi melalui program-

program kerja. Penanggulangan bencana kebanyakan bersifat insidental (tindak darurat). Masyarakat, Instansi pemerintah dan institusi lainnya akan sibuk, panik. Berbondong-bondong memberikan bantuan seperti makanan, obat-obatan, selimut dan baju layak pakai serta lainnya, yang ini hanya berlangsung sampai beberapa minggu saja. Namun setelah itu (2 bulan-3 bulan dan seterusnya), donatur tersebut akan pergi/hilang satu persatu, tinggallah para korban mengatasi permasalahan sosial ekonominya sendiri. Kondisi ini yang disebut pasca bencana, masih perlu memperoleh bantuan, karena mereka tidak/ belum dapat berbuat apa-apa, ketiadaan lahan, rumah, tempat usaha dan modal usaha/ kerja akibat bencana alam.

Perlu ada tindakan pemberdayaan terhadap para korban bencana melalui pranata sosial/lembaga sosial lokal yang peduli dan diperkirakan mampu dan mau membantu mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Selain itu dengan pemberdayaan ini juga akan mempersiapkan tenaga lapangan untuk mendampingi, memberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat untuk menjaga alam, terutama pada daerah yang diperkirakan rawan terjadi longsor, banjir dan kebakaran lahan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan langkah-langkah kongkrit dan upaya yang diperlukan apabila terjadi bencana alam, terutama pada daerah/wilayah yang selama ini diprediksi sering/rawan terjadinya bencana alam.

## V. METODE

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai media, baik media cetak, media elektronik maupun hasil penelitian yang terkait dengan bencana alam. Data dan informasi yang tersaji sebagian besar tahun 2000 - 2006, karena pada tahun ini diperkirakan cukup banyak terjadi bencana alam.

## VI. KEJADIAN GEMPA TERMASUK TSUNAMI RENTANG TAHUN 2000-2006

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, bahwa telah terjadi +/- 16 kali terjadi gempa disertai tsunami dibelahan

bumi ini. Gempa terbesar terjadi NAD Indonesia dengan 8,5 SR (skala Richter) dan disertai tsunami. Korban meninggal di NAD tercatat 166.520 jiwa dan Sumatera Utara 240 jiwa. Gempa dan tsunami ini merupakan bencana alam terdasyat selama kurun waktu 6 tahun (2000 a/d 2006).

Selain itu terdapat pula warga asing, yang tercatat 5 orang meninggal, luka-luka 10 orang, yang berasal dari Belanda, Perancis dan Belgia.

Kejadian bencana alam ini terasa terus terjadi dengan berbagai jenis bencana, apakah itu yang rutin terjadi hampir disetiap tahun yakni

Tabel 1. Bencana Alam Gempa Disertai Tsunami Tahun 2000 – 2006

Tanggal	Jenis Bencana Alam	Wilayah	Korban Tewas (jiwa)
4 Mei 2000	gempa 6,5 SR	Sulawesi Tengah	386
26 Jan 2001	gempa 7,9 SR	India	24.000
23 Jan 2001	gempa 7,9 SR	Andes	600
5 Mei 2002	gempa 7,2 SR	Afganistan	2.000
22 Juni 2006	gempa 6,5 SR	Iran	500
24 Feb 2003	gempa 7,6 SR	China	261
1 Mei 2003	gempa 6,3 SR	Turki	167
22 Mei 2003	gempa 7,3 SR	Aljazair	1.500
25 Des 2003	gempa 6,6 SR	Iran	41.000
6 Feb 2004	gempa 6,9 SR	Nabire Papua	25
24 Feb 2004	gempa 6,5 SR	Maroko	564
12 Nov 2004	gempa 6,4 SR	Laut Flores	33
26 Nov 2004	gempa 6,5 SR	Nabire Papua	28
26 Des 2004	gempa & Tsunami 8,5 SR	NAD & Sumut	166.520 NAD 240 Sumut
7 Mei 2006	gempa 6,2 SR	DI Yogyakarta & Jateng	ribuan tewas
17 Juli 2006	gempa & tsunami 6,8 SR dan 5,0 SR	Jawa Barat (Kab.Ciamis) dan Jawa tengah	ratusan tewas
19 Juli 2006	gempa 6,2 SR	Banten	tidak diketahui
23 Juli 2006	gempa 6,6 SR	Gorontalo	tidak diketahui

Sumber Data : Diolah kembali dari berbagai sumber. (Daud.B, Juli 2006)

Menurut data dari Departemen Sosial pada tanggal 21 juli 2006, Pk 9.00 WIB korban gempa dan tsunami di Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk DI Yogyakarta sebagai berikut:

Jawa Barat	Meninggal	445 orang
	Luka-luka	557 orang
	Hilang	72 orang
Jawa Tengah	Meninggal	115 orang
	Luka-luka	35 orang
	Hilang	108 orang
DI Yogyakarta	Meninggal	4 orang

banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, maupun kejadian bencana lain seperti gempa dan gelombang pasang (Rob) air laut, yang diperkirakan terjadi akibat pemanasan global. Korban yang berjatuhan juga tidak sedikit jumlahnya, begitupula dengan harta benda dan kerusakan sarana prasarana dan fasilitas sosial dan umum.

Berikut ini data mengenai gempa yang terjadi di Indonesia selama tahun 2006 Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana lebih banyak berorientasi pada

Tabel 2. Bencana Gempa dan Lokasi periode tahun 2006

Tanggal	Jenis Bencana Alam	Lokasi
1 Jan 2006	Gempa 5,8 SR	NAD
4 Feb 2006	Gempa Tektonik 5,1 SR	Kota Palu & Kab Poso
6 Maret 2006	Gempa 5,1 SR	Bengkulu
27 Mei 2006	Gempa Tektonik 5,9 SR	DI Yogyakarta & sekitarnya
30 Mei 2006	Gempa Tektonik 5,3 SR	Wamena, Papua
6 Juni 2006	Gempa Tektonik 5,5 SR	Manado
15-16 Juni '06	Gempa Tektonik 3,4 SR	Bandar Lampung
19 Juni 2006	Gempa 4,1 SR	Bandar Lampung
17 Juli 2006	Gempa Tektonik 6,8 SR	Pantai selatan P.Jawa
19 Juli 2006	Gempa 6,2 SR	Banten di Pantai Barat Jawa
23 Juli 2006	Gempa Tektonik 6,6 SR	Kota Luwuk, Kab.Banggai Prov.Sulteng, serta Gorontalo
23 Juli 2006	Gempa Tektonik 3,6 SR	Singaraja, Kab.Buleleng Bali
26 Juli 2006	Gempa 5.0 SR Gempa 4,4 SR & 4,6 SR Gempa 5,3 SR	Meulaboh NAD Tasikmalaya Jawa Barat Cilacap Jawa Tengah
27 Juli 2006	Gempa 6,1 SR	Gunung Sitoli, Sumut

Sumber Data: Diolah kembali dari beberapa sumber (Daud.B. Jul 2006)

Sepertinya hampir setiap bulan di tahun 2006 terjadi bencana alam gempa yang terjadi di hampir seluruh pulau di Indonesia, kecuali Kalimantan, Nusa Tenggara dan beberapa pulau lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah NKRI merupakan wilayah yang relatif sering terjadi bencana gempa, baik gempa tektonik maupun vulkanik.

## VII. TEMUAN PENELITIAN

Bencana Alam dan korbannya telah cukup banyak dilakukan penelitian yang diantaranya ingin diketahuinya permasalahan sosial ekonomi, sarana prasarana dan infra stuktur yang rusak dan informasi lainnya, sesuai kebutuhan data dan informasi yang diperlukan bagi suatu instansi dan institusi terkait.

Hasil penelitian (Teti Ati Padmi Dkk, 2003), yang dilakukan pada lima lokasi (Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kabupaten Situbondo), mendiskripsikan bahwa; Permasalahan sosial bisa terjadi dimana-mana akibat bencana alam atau bencana sosial yang menyebabkan kerugian harta, benda dan jiwa. Kondisi seperti ini menyebabkan seseorang menjadi stress, trauma, depresi dan lain-lain.

memenuhi kebutuhan fisik (makan), sementara kebutuhan psikologis kurang mendapat perhatian.

Penanganan permasalahan korban bencana bukan pekerjaan yang mudah, karena di dalamnya terdapat berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dan amat kompleks. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para korban bencana diperlukan penanganan dan pendekatan praktik pekerjaan sosial yang memerlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta sarana dan prasarana yang memadai.

Meski telah terbentuk Satlak PBP (satuan pelaksana penanggulangan bencana), namun sering terjadi kurang keterpaduan antara instansi yang satu dengan yang lain, sehingga memberi kesan yang kurang baik yaitu tampak masing-masing instansi agar terlihat lebih menonjol antara instansi yang satu dengan yang lain, menyusun rencana sering *overlapping*, dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kurangnya persediaan air bersih dan keadaan fisik para korban bencana dalam kondisi lemah, maka sering timbul berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas,

diare, demam, gatal-gatal (penyakit kulit) dan lainnya.

Penelitian lainnya (Siti Aminatun dan Dwi Winarni, 2003), di Sukabumi, Kecamatan Warung Kiara, terhadap 135 responden yang tersebar di Desa Warung Kiara, pada Dusun Lebak Betah dan Dusun Babakan Baru, yang merupakan warga relokasi bencana tanah longsor yang mengakibatkan seluruh warga masyarakat kehilangan tempat tinggal, harta benda dan lahan pertanian. Temuan penelitian seperti berikut ini : Pada pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat korban bencana telah memiliki struktur organisasi Satlak PBP dengan SK Bupati No.489 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Pengungsi (Satlak PBP). SK Bupati tersebut lebih menitik beratkan pada penanggulangan bencana, sebelum dan sesudah bencana. Program PBS (Penyuluhan dan Bimbingan Sosial) untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana sebagai upaya pemberdayaan masyarakat belum terprogram. Data lapangan menunjukkan baru 42 orang (31,11 %) yang mengaku pernah mengikuti (terlibat) kegiatan PBS, sisanya 75 orang (55,50 % dan 18 orang (13,33 %) menyatakan tidak pernah mengikuti dan tidak tahu menahu pernah diselenggarakan kegiatan PBS, dengan alasan tidak pernah di undang.

Disamping itu program kegiatan PBS ini kurang dikenal masyarakat sekitar daerah rawan bencana, karena program tersebut kurang di sosialisasikan kepada masyarakat setempat. Keterlibatan mereka dalam kegiatan persiapan dini yang dilakukan Satlak PBP juga belum optimal, baik keterlibatan dalam kegiatan perencanaan program SAR, penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan korban maupun pelatihan lain.

Temuan lain dari penelitian ini adalah pada masalah pasca bencana, dimana diketahui hilangnya mata pencaharian sebagai petani (bercocok tanam) akibat areal persawahan dan lahan tertimbun tanah longsor.

Petugas Satlak PBP dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat pada tahap pasca bencana memerlukan proses dan waktu dalam pelaksanaan relokasi. Pembangunan perumahan baru di relokasi masih membutuhkan berbagai penanganan

baik fisik maupun penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka penataan lingkungan agar dapat berfungsi sosial sebagaimana mestinya. Penyuluhan dan bimbingan sosial lanjutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana dalam mengantisipasi terjadinya bencana belum dilaksanakan.

Hasil pengkajian (Warto Dkk, 2002), bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korban bencana alam dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

Pengetahuan tentang bencana alam, manajemen penanggulangan korban, usaha kesejahteraan sosial, serta pengetahuan tentang otonomi daerah dan keterampilan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan korban bencana alam.

Deskripsi empirik diatas mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ikut menangani korban bencana sangat dibutuhkan, karena adanya berbagai kekurangan pada aspek SDM, program, pendanaan dan lainnya pada instansi pemerintah, terutama penanganan pasca bencana.

Peran masyarakat dimaksud adalah melalui wadah atau organisasi kemasyarakatan yang berbentuk pranata sosial/lembaga sosial lokal yang selama ini peduli dan berperan aktif membantu para korban di lokasi terjadinya bencana alam. Dalam hal ini pranata sosial/ lembaga sosial lokal berkolaborasi membentuk wadah yang akan membantu korban mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Selain itu wadah kolaborasi ini juga diharapkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengakses sumber dan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu warga korban bencana, khususnya pada pasca bencana.

## VIII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA

Seperti yang telah diungkapkan diatas, permasalahan yang cukup memprihatinkan adalah pada pasca bencana, yakni 2 atau 3 bulan sesudah terjadinya musibah. Instansi

Pemerintah dan Institusi yang peduli pada periode ini sudah kurang atau bahkan tidak peduli lagi akan nasib para korban. Mereka beranggapan sudah merasa cukup membantu dan menolong korban. Masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan, sehingga lambat laun instansi dan institusi tersebut menghilang dari lokasi termasuk bantuannya.

Tinggallah masyarakat korban dengan segala kekurangannya mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya. Tentunya mereka akan memerlukan waktu lama untuk memulai usaha/pekerjaan seperti sedia kala, karena ketiadaan modal dan akses ekonomi yang dapat mereka manfaatkan, yang disebabkan hancur atau hilang ditelan bencana.

Suatu usulan kongkrit yang perlu dilakukan pada lokasi bencana untuk mempercepat proses pemulihan sosial ekonomi pada para korban, maka diperlukan upaya pemberdayaan, karena diasumsikan mereka sedang/ tidak bisa berbuat akibat kejadian bencana. Pemberdayaan dilakukan melalui pranata sosial/lembaga lokal yang selama ini peduli dan membantu korban serta dekat dengan masyarakat korban.

Beberapa pranata sosial/lembaga sosial lokal berkolaborasi, membentuk suatu forum/wadah, yang dalam hal ini merupakan perwakilan pranata sosial/lembaga lokal yang ditunjuk, ditambah dengan beberapa unsur tokoh masyarakat yang secara bersama-sama membuat program kegiatan sosial ekonomi pasca bencana, disamping membentuk inisial kelompok sebagai wadah keorganisasian, agar tercipta unsur administrasi dan operasional kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui wadah kolaborasi pranata sosial/lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat ini membuat program kegiatan proiritas untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu wadah/forum kolaborasi ini secara bersama-sama berupaya untuk melakukan aktivitas ekonomi, dapat membuka akses pada lembaga keuangan yang ada untuk mendukung apakah itu permodalan, tempat usaha dan lainnya yang diperlukan.

Tentunya sebelum kegiatan ini dilakukan, harus dilakukan kajian/penelitian oleh suatu tim peneliti, agar diperoleh gambaran dan informasi akurat akan permasalahan sosial

pasca bencana. Melalui kajian/penelitian dapat diketahui pranata sosial ekonomi yang eksis dan peduli serta diprediksikan dapat dikembangkan, mengetahui sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan, aktivitas sosial ekonomi yang dapat dikembangkan, prakiraan kendala-kendala lapangan dan dukungan pemerintah daerah dan institusi setempat.

## IX. LANGKAH PEMBERDAYAAN

Langkah pemberdayaan terhadap pranata sosial/lembaga sosial lokal secara kolaborasi ini memiliki beberapa tahapan, dan ini berlangsung berkesinambungan antara 2 sampai 3 tahun. Tahapan dimaksud adalah :

### A. Tahap Persiapan

#### 1. Kajian/penelitian

Melakukan kajian/penelitian awal untuk mengetahui permasalahan sosial ekonomi pasca bencana; jumlah korban yang masih memerlukan bantuan; mengetahui keberadaan pranata sosial/lembaga sosial lokal yang ada dan peduli, dan upaya yang pernah dilakukan; mengetahui potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan; memprediksi hambatan/kendala dan kemudahan dalam upaya pemberdayaan; mengetahui upaya yang pernah dilakukan Pemda setempat terhadap korban bencana dan kesiapan aparat Pemda terkait bila dilakukan upaya pemberdayaan; dan mencari dan mempersiapkan tenaga fasilitator (yang dianggap pakar/ahli, 2 orang) dan tenaga pendampingan (2 orang) yang dianggap mampu dan mau bekerjasama dengan masyarakat korban, mendampingi kegiatan sampai dengan dilakukan terminasi.

#### 2. Pra Pemberdayaan

- a. Membentuk tim peneliti
- b. Membuat rancangan pemberdayaan, modul fasilitator dan modul pendampingan, yang didasarkan dari hasil kajian/penelitian lapangan, menetapkan pranata sosial/lembaga sosial lokal untuk diberdayakan, menetapkan lokasi pemberdayaan

dan menetapkan stimulan untuk mendukung program kegiatan.

- c. Surat menyurat, izin penelitian dan waktu pemberdayaan

#### B. Tahap Pemberdayaan

1. Sosialisasi atau penyuluhan pada aparat pemda terkait, pengurus beberapa pranata sosial/lembaga sosial lokal (4 – 6 pranata/lembaga) dan tokoh masyarakat
  2. Menetapkan tenaga fasilitator dan tenaga pendamping, menjelaskan maksud dan tujuan pemberdayaan pasca bencana
  3. Menetapkan lokasi pemberdayaan, menetapkan pranata sosial/lembaga sosial lokal yang dalam hal ini pengurus inti yang ditunjuk untuk mewakili (masing-masing 2 orang), tokoh masyarakat (formal dan informal), aparat pemda (provinsi dan kab/kota) masing-masing 2 orang dan tokoh informal 2 orang, sehingga jumlah peserta kolaborasi ini berjumlah 20 orang.
  4. Pelaksanaan pemberdayaan dengan alokasi waktu 6 – 8 bulan, dapat mengadopsi Kep.Men.Sos RI No.12/HUK/2006, Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, yang telah di implementasikan pada beberapa daerah.
  5. Memberikan stimulan kepada kelompok/forum yang telah diberdayakan sebagai dukungan kegiatan dan program yang telah dibuat untuk perbaikan sosial ekonomi para korban bencana. Besaran dana stimulan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada pemerintah.
  6. Monitoring dan Evaluasi oleh tim peneliti untuk penyempurnaan kegiatan pemberdayaan.
- #### C. Tahap Akhir
1. Membuat laporan hasil pemberdayaan oleh tim peneliti, sebagai pertanggung jawaban administrasi dan ilmiah.
  2. Penyempurnaan model untuk replikasi di tempat lain
  3. Terminasi, pemutusan kegiatan pemberdayaan.

## X. KESIMPULAN

1. Secara geografis Indonesia termasuk rawan bencana alam, sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk menyiapkan masyarakat dalam kesiagaan menghadapi bencana, pada saat tanggap darurat saat terjadinya bencana dan pasca bencana;
2. Kekurangnya daerah dalam melakukan pencegahan maupun terjadinya bencana, baik SDM, kebijakan daerah maupun penanganan masalah sosial ekonomi pasca bencana alam, memerlukan upaya pemberdayaan melalui kolaborasi pranata sosial/ lembaga sosial lokal, agar korban bencana dapat tertangani dan teratasi masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal dan regional.
3. Model pemberdayaan yang diajukan ini merupakan usulan untuk dilakukan aksi dengan mengadopsi Keputusan Menteri Sosial RI No. 12/HUK/2006 sehingga dapat menjadi suatu model yang untuk selanjutnya dapat direplikasikan pada daerah dan jenis bencana alam lainnya, serta dapat diadopsi oleh aparat Pemda untuk mengatasi masalah sosial ekonomi pasca bencana alam.

## XI. REKOMENDASI

1. Menjadikan masyarakat sebagai potensi sumber daya dalam penanggulangan bencana akan membantu tingkat responsif terhadap penanggulangan bencana alam itu sendiri, terutama pada kasus kejadian bencana alam yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan.
2. Menjadikan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sebagai salah satu strategi dalam upaya mengatasi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana alam.
3. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), Adanya dukungan pelayanan terhadap korban bencana (khususnya di Departemen Sosial) dalam

- hal ini Direktorat BSK Bencana Alam Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial;
4. Unit Direktorat Bencana Alam dan Badiklit Kesejahteraan Sosial, melakukan upaya berkesinambungan terhadap pusat penelitian dan pelatihan penanggulangan bencana yang telah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dan P.M Australia Kevin Ruud. Tim ini merupakan tim flat (tim tetap) yang sudah dipersiapkan/dikondisikan sebagai tim yang siap diterjunkan ke daerah bencana alam untuk melakukan kajian/penelitian cepat, untuk mengetahui kebutuhan dan penanganan korban serta siap dan tepat sasaran dalam memberikan bantuan dan penanganan korban oleh Direktorat Bencana Alam, termasuk mempersiapkan pemberdayaan masyarakat pasca bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iman A.Sadikun, *Peranan Iptek Dan Penanggulangan Bencana Di Indonesia*, Jakarta, 9 Agustus 2007.
- M.Thalhah,DR,H,.SH,MH, Achmad Mufid AR, *Fiqih Ekologi, Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Total Media,Yogyakarta, 2008.
- Robert.J.Kodoatie,DR,Ir,M,Eng, Sugiyanto,Ir,M,Eng, *Banjir Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- P.Canahar (editor), *Bencana Gempa Dan Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara*, Penerbit Buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2005.
- Siti Aminatun,Dra, Swi Winarni.Dra, *Penelitian Profil Pelayanan Sosial Satlak/Satgas Penanggulangan Bencana Dan Pengungsi (PBP) Pasca Bencana Kepada Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi*, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)Yogyakarta, Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Yogyakarta, 2003.
- Teti Ati Padi Dkk, *Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial Di Pusat Pelayanan Korban Bencana*, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta,2003.
- Warto Dkk, *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)Yogyakarta, Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Yogyakarta, 2003.
- Word Press (Disaster Are Part Of Daily Life), *Hidup Bersama Resiko Bencana*, (<http://bencana.net>).
- Kompas 12 September 2001
- Warta Kota, 27 Juli 2006
- Solopos, 27 Desember 2008
- Solopos, 07 Januari 2009

## BIODATA PENULIS :

Daud Bahransyaf, Peneliti Madya pada Balai Besar Penelitian Pengembangan .Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, Badiklit Kesos, Departemen Sosial RI